

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAM MENGELOLA KAWASAN PUNCAK, BOGORMochamad Rif'at Denasetya¹, Ikhwan Aulia Fatahilah²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹mochamadrifat@gmail.com, ²ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstract: The Puncak area in Bogor, Indonesia, is famous for its natural beauty and is a popular tourist destination. However, rapid tourism growth and urbanization have taken a toll on its ecosystem, leading to problems such as illegal logging and pollution. This situation requires effective environmental law enforcement to balance development and conservation efforts. This research investigates the effectiveness of environmental law enforcement in managing the Puncak area, identifies implementation barriers, and explores potential solutions to improve environmental protection. A mixed methods approach was used, combining qualitative and quantitative research methods, including document analysis and field studies. Participants include local government officials, environmental agencies, and community members. The research findings reveal significant weaknesses in environmental law enforcement, characterized by low levels of sanctions for violations and inadequate capacity among law enforcement agencies. In addition, there is a lack of public awareness regarding environmental law and its implications, which results in minimal public participation in environmental monitoring. This study underscores the need for reform in the environmental law enforcement system, emphasizing capacity building for law enforcement personnel, simplification of regulations, and increased coordination between agencies. Additionally, the study calls for increased educational initiatives to increase public awareness and encourage active participation in environmental management.

Key words: Environmental law enforcement, Puncak Bogor, sustainable development, community participation, illegal logging, pollution.

Abstrak: Kawasan Puncak di Bogor, Indonesia, terkenal akan keindahan alamnya dan menjadi tujuan wisata yang populer. Namun, pertumbuhan pariwisata yang pesat dan urbanisasi telah berdampak buruk pada ekosistemnya, yang menyebabkan berbagai masalah seperti penebangan liar dan polusi. Situasi ini memerlukan penegakan hukum lingkungan yang efektif untuk menyeimbangkan upaya pembangunan dan konservasi. Penelitian ini menyelidiki efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam

Article HistoryReceived: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mengelola kawasan Puncak, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan mengeksplorasi solusi potensial untuk meningkatkan perlindungan lingkungan. Pendekatan metode campuran digunakan, yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, termasuk analisis dokumen dan studi lapangan. Partisipan meliputi pejabat pemerintah daerah, lembaga lingkungan hidup, dan anggota masyarakat. Temuan penelitian mengungkapkan kelemahan signifikan dalam penegakan hukum lingkungan, yang ditandai dengan rendahnya tingkat sanksi atas pelanggaran dan kapasitas yang tidak memadai di antara lembaga penegak hukum. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran publik mengenai hukum lingkungan dan implikasinya, yang mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan. Studi ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan, dengan menekankan peningkatan kapasitas bagi personel penegak hukum, penyederhanaan peraturan, dan peningkatan koordinasi antarlembaga. Selain itu, studi ini menyerukan peningkatan inisiatif pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Kata kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Puncak Bogor, Pembangunan Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Penebangan Liar, Polusi.

PENDAHULUAN

Kawasan Puncak, Bogor, merupakan salah satu lokasi yang memiliki keindahan alam luar biasa dan menjadi tujuan wisata populer di Indonesia. Namun, pertumbuhan pesat sektor pariwisata dan urbanisasi di daerah ini membawa dampak serius terhadap ekosistem dan lingkungan. Permasalahan seperti penebangan liar, pencemaran, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan semakin meningkat, menimbulkan tantangan signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi.

Regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, dirancang untuk melindungi lingkungan dan mengatur penggunaan sumber daya alam. Namun, implementasi hukum lingkungan di kawasan Puncak seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak pelanggaran yang terjadi tanpa sanksi yang memadai, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Puncak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga lingkungan hidup, seringkali menciptakan kebingungan dan tumpang tindih dalam tanggung jawab. Koordinasi

yang buruk ini mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum lingkungan juga berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Sebagian besar masyarakat di kawasan Puncak masih belum memahami peraturan yang ada dan dampak dari pelanggaran lingkungan. Pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat yang aktif berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah.

Kendala lainnya adalah adanya konflik kepentingan di antara berbagai aktor yang terlibat. Kepentingan ekonomi yang tinggi, terutama di sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur, seringkali mengesampingkan aspek lingkungan. Korupsi dan praktik tidak etis dalam pengelolaan sumber daya alam juga dapat menghalangi upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kawasan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada integritas dan komitmen semua pihak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pelaksanaan hukum lingkungan yang lebih baik.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengelola kawasan Puncak, Bogor. Dengan meninjau berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga partisipasi masyarakat, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan kawasan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang, diharapkan solusi yang tepat dapat diimplementasikan untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan (Haryanto, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengelola kawasan Puncak, Bogor, dengan fokus pada identifikasi permasalahan dan solusi yang dapat diimplementasikan. Pendekatan yang digunakan mencakup kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, serta analisis dokumen dan studi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mengelola Kawasan Puncak, Bogor" mencerminkan fokus pada bagaimana sistem hukum yang ada dapat berfungsi dalam melindungi lingkungan di kawasan Puncak, yang dikenal dengan keindahan alamnya. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan akibat pertumbuhan pariwisata dan urbanisasi yang pesat, yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada (Rachman, 2019).

Permasalahan pertama, yaitu lemahnya implementasi hukum dan sanksi, mencerminkan situasi di mana meskipun regulasi telah ditetapkan untuk melindungi lingkungan,

penerapannya di lapangan sangat kurang efektif. Banyak pelanggaran yang terjadi tanpa adanya sanksi yang berarti, sehingga para pelanggar merasa tidak ada konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berfungsi secara efektif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran dan kerusakan lingkungan. Ketidakpastian hukum ini menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang diinginkan.

Selanjutnya, permasalahan kedua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat dan partisipasi, menyoroti kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu lingkungan. Masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hukum lingkungan cenderung tidak berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Pendidikan yang rendah mengenai dampak pelanggaran lingkungan juga berkontribusi pada situasi ini. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pemerintah dalam penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena tidak ada dukungan dari komunitas untuk menjaga dan melindungi lingkungan.

Kedua permasalahan ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Jika implementasi hukum tetap lemah, masyarakat tidak akan melihat pentingnya berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan. Sebaliknya, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjadi efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang mencakup peningkatan penegakan hukum serta pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat, agar tercipta sinergi yang mendukung pengelolaan kawasan Puncak yang berkelanjutan.

A. Lemahnya Implementasi Hukum dan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di kawasan Puncak mengalami kelemahan signifikan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara efektif. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase kasus pelanggaran yang mendapatkan sanksi hanya mencapai angka yang sangat rendah, mengindikasikan adanya ketidakberdayaan sistem hukum dalam menegakkan aturan (Sari et al., 2021).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian mengidentifikasi bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menghambat upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran, seperti penebangan liar dan pencemaran, tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya.

Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi turut memperburuk situasi ini. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan di Puncak, seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan instansi lainnya, menciptakan kebingungan dalam penentuan tanggung jawab. Penelitian menemukan bahwa koordinasi yang buruk di antara lembaga-lembaga ini mengakibatkan pelanggaran hukum yang terjadi tidak ditindaklanjuti secara konsisten.

Persepsi masyarakat terhadap hukum juga berkontribusi pada lemahnya implementasi hukum. Banyak pelanggar yang merasa bahwa risiko untuk tertangkap atau mendapatkan sanksi sangat kecil, sehingga mereka terus melakukan pelanggaran. Data menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari tindakan

mereka terhadap lingkungan juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perlu adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum lingkungan dan dampaknya juga sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang merusak lingkungan.

B. Minimnya Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan masih sangat rendah. Survei yang dilakukan di kawasan Puncak mengungkapkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum lingkungan dan dampak dari pelanggaran. Hanya sedikit yang mengetahui peraturan yang ada dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Pratiwi, 2020).

Minimnya pendidikan lingkungan juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran ini. Penelitian menemukan bahwa materi tentang hukum dan perlindungan lingkungan tidak secara efektif diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga generasi muda tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai isu-isu lingkungan (Setiawan, 2022). Hal ini berimplikasi pada perilaku masyarakat yang cenderung acuh terhadap pelanggaran lingkungan, seperti penebangan liar dan pencemaran.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil individu yang terlibat dalam kegiatan pengawasan atau pelaporan pelanggaran lingkungan. Kebanyakan masyarakat merasa bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah semata, tanpa menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat penting untuk keberhasilan upaya perlindungan lingkungan.

Rendahnya partisipasi ini dapat dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Banyak masyarakat yang merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti atau bahwa tindakan hukum tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Penelitian ini mencatat bahwa membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat (Kurniawan, 2021), diperlukan program pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif. Inisiatif ini harus melibatkan masyarakat dalam diskusi dan aktivitas lingkungan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam menjaga kelestarian kawasan Puncak. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, dan mereka akan lebih aktif dalam menjaga lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di kawasan Puncak, Bogor, teridentifikasi dua permasalahan utama yang menghambat upaya perlindungan lingkungan. Pertama, lemahnya implementasi hukum dan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelanggaran seringkali tidak

mendapatkan penindakan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, ketidakjelasan dalam regulasi, serta koordinasi yang buruk antarinstansi. Masyarakat juga merasa minim risiko akibat tindakan mereka, sehingga pelanggaran terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti.

Kedua, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Survei menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami hukum lingkungan dan dampaknya, sementara pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah belum dioptimalkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan sangat terbatas, dengan kepercayaan yang rendah terhadap aparat penegak hukum, sehingga mereka tidak merasa terdorong untuk berperan aktif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat dan penyederhanaan regulasi. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan yang intensif harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif sangat penting agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan di kawasan Puncak.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, A, 'Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Lingkungan Di Kawasan Perkotaan', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18.1 (2019), 45–55
- Kurniawan, R., *Edukasi Lingkungan Untuk Masyarakat: Membangun Kesadaran Akan Perlunya Perlindungan Lingkungan*, 2021
- Pratiwi, D, *Keterlibatan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus Di Kawasan Wisata*, 2020
- Rachman, A., *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Praktik Di Indonesia*, 2019
- Sari, D. P., & Nurjanah, S, *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi*, 2021
- Setiawan, B, *Pendidikan Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.*, 2022